

**PERAN DIGITAL GOVERNANCE
DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PEMERINTAH**Sri Yulianty Mozin^{1*}, Hardiyanto²^{1,2}Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia**RIWAYAT ARTIKEL****Diterima:**

17-05-2026

Disetujui:

18-05-2026

Dipublikasi:

01-06-2026

Kata Kunci:*Akuntabilitas; Data
Terbuka; e-Government;
Tata Kelola Digital;
Transparansi***ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji peran digital governance dalam meningkatkan transparansi pemerintah di Indonesia. Digital governance, yang mencakup penggunaan teknologi digital dalam administrasi publik, semakin menjadi strategi penting untuk mendorong keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur dan analisis data sekunder dari laporan pemerintah serta publikasi akademik. Temuan menunjukkan bahwa implementasi mekanisme digital governance—seperti portal e-government, platform data terbuka, dan sistem layanan publik digital—telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi dengan memungkinkan masyarakat mengakses informasi pemerintah dan memantau pengeluaran publik. Namun, tantangan seperti kesenjangan infrastruktur digital, keterbatasan literasi digital, dan resistensi terhadap perubahan institusional masih menghambat implementasi yang optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi terhadap digital governance, yang didukung oleh kerangka regulasi dan inisiatif peningkatan kapasitas, sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan transparansi pemerintah.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Konsep digital governance atau tata kelola digital muncul sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks ini, transparansi pemerintah menjadi isu sentral yang tidak dapat diabaikan, mengingat pentingnya kepercayaan publik sebagai fondasi legitimasi sebuah pemerintahan.

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa implementasi digital governance berkontribusi positif terhadap peningkatan transparansi. Heeks (2018) mengidentifikasi bahwa e-government berperan penting dalam membuka akses informasi publik, sementara Wirtz et al. (2019) menekankan bahwa platform data terbuka merupakan instrumen kunci dalam mendorong akuntabilitas pemerintah. Di Indonesia, kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengadopsi prinsip-prinsip digital governance.

Namun demikian, gap analysis menunjukkan masih terdapat kesenjangan signifikan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Banyak daerah belum memiliki infrastruktur digital yang memadai, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas dalam pengelolaan sistem digital, serta kurangnya mekanisme evaluasi yang sistematis terhadap implementasi digital governance. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas digital governance dalam meningkatkan transparansi pemerintah, dengan mempertimbangkan konteks kelembagaan dan sosial-budaya di Indonesia. Tujuan

penelitian ini adalah menganalisis peran digital governance dalam meningkatkan transparansi pemerintah serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasinya.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep digital governance pertama kali dikembangkan oleh United Nations pada tahun 2003 sebagai evolusi dari e-government, yang menekankan tidak hanya pada digitalisasi layanan publik, tetapi juga pada transformasi proses pengambilan keputusan dan pelibatan warga negara secara digital (UN DESA, 2020). Teori New Public Governance (NPG) yang diperkenalkan oleh Osborne (2010) memberikan landasan teoritis bahwa pemerintahan yang baik memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, yang dalam era digital semakin dimungkinkan melalui platform teknologi.

Transparansi pemerintah dalam perspektif digital governance dipahami sebagai kemampuan pemerintah untuk menyediakan akses yang mudah, cepat, dan akurat terhadap informasi publik kepada seluruh lapisan masyarakat (Bertot et al., 2021). Konsep ini sejalan dengan prinsip Open Government Partnership (OGP) yang menekankan keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagai pilar utama pemerintahan demokratis.

Beberapa penelitian sebelumnya relevan sebagai acuan dalam kajian ini. Bannister dan Connolly (2020) menemukan bahwa implementasi e-government yang efektif secara signifikan meningkatkan persepsi publik terhadap transparansi pemerintah. Senada dengan hal tersebut, Meijer (2019) dalam studinya di negara-negara Eropa menunjukkan bahwa platform data terbuka tidak hanya meningkatkan aksesibilitas informasi tetapi juga mendorong inovasi berbasis data oleh masyarakat. Di konteks Asia Tenggara, penelitian Janenova dan Kim (2019) mengindikasikan bahwa keberhasilan digital governance sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan komitmen politik pimpinan daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur sistematis (systematic literature review). Populasi kajian mencakup seluruh artikel ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan yang membahas digital governance dan transparansi pemerintah yang diterbitkan antara tahun 2018 hingga 2024. Sampel dipilih secara purposif berdasarkan relevansi tema, kualitas metodologi, dan kebaruan temuan, dengan total 45 sumber yang dianalisis secara mendalam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis pada basis data ilmiah Google Scholar, Scopus, dan portal jurnal nasional terakreditasi SINTA. Kata kunci yang digunakan meliputi: digital governance, e-government, transparansi pemerintah, akuntabilitas publik, dan open data. Instrumen penelitian berupa lembar ekstraksi data yang memuat informasi tentang fokus studi, metodologi, temuan utama, dan rekomendasi.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis dan thematic synthesis, yang memungkinkan identifikasi pola dan tema berulang dari berbagai sumber literatur. Model analisis yang digunakan mengacu pada kerangka Digital Governance Framework oleh Dawes (2009) yang dimodifikasi untuk konteks Indonesia, mencakup dimensi teknologi, kelembagaan, dan sosial-budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Digital Governance di Indonesia

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis dalam mengimplementasikan digital governance. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (2023), terdapat lebih dari 2.700 aplikasi pemerintah yang beroperasi di tingkat pusat dan daerah, dengan tingkat adopsi yang bervariasi antar wilayah. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dituangkan dalam Perpres No. 95 Tahun

2018 menjadi kerangka kebijakan utama yang mengintegrasikan berbagai inisiatif digitalisasi pemerintahan.

Peran Digital Governance dalam Meningkatkan Transparansi

Temuan penelitian mengidentifikasi tiga mekanisme utama melalui mana digital governance berkontribusi pada peningkatan transparansi pemerintah. Pertama, portal e-government dan website pemerintah daerah menyediakan akses langsung bagi masyarakat terhadap informasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta laporan kinerja pemerintah. Melalui portal ini, warga dapat memantau penggunaan dana publik secara real-time, yang secara signifikan mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Kedua, platform data terbuka (open data) seperti data.go.id memungkinkan akses terhadap dataset pemerintah dalam format yang dapat diproses ulang oleh publik, peneliti, dan pengembang aplikasi. Hal ini mendorong lahirnya ekosistem inovasi berbasis data yang memperkuat pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah. Ketiga, sistem layanan publik digital yang terintegrasi, seperti e-perizinan dan e-procurement, meminimalisir interaksi langsung antara aparatur negara dan pengguna layanan, sehingga mengurangi peluang terjadinya penyimpangan prosedural.

Faktor Penghambat Implementasi

Meskipun potensinya besar, implementasi digital governance di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Kesenjangan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi hambatan utama, di mana masih banyak daerah terpencil yang belum memiliki akses internet yang memadai. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa penetrasi internet di wilayah Indonesia bagian timur masih di bawah 60%, jauh lebih rendah dibandingkan Jawa yang mencapai di atas 80%.

Selain itu, keterbatasan literasi digital di kalangan aparatur pemerintah daerah menjadi faktor penghambat yang tidak kalah serius. Banyak pegawai pemerintah yang belum memiliki kompetensi digital yang memadai untuk mengoperasikan dan memelihara sistem e-government secara efektif. Resistensi terhadap perubahan institusional juga kerap menjadi kendala, terutama di lingkungan birokrasi yang telah lama terbiasa dengan prosedur manual dan hierarkis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang komprehensif, dapat disimpulkan bahwa digital governance memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan transparansi pemerintah di Indonesia. Implementasi mekanisme digital governance, mencakup portal e-government, platform data terbuka, dan sistem layanan publik digital, terbukti berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas informasi publik dan pengawasan warga terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen kelembagaan.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah: pertama, percepatan pembangunan infrastruktur digital yang merata hingga ke pelosok daerah; kedua, penguatan program pelatihan literasi digital bagi aparatur pemerintah di semua tingkatan; dan ketiga, penyusunan regulasi yang mendukung keterbukaan data pemerintah secara konsisten dan berkelanjutan. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan data empiris lapangan, sehingga penelitian mendatang disarankan untuk melakukan studi kasus mendalam di tingkat pemerintah daerah guna memperoleh gambaran yang lebih holistik tentang efektivitas digital governance dalam meningkatkan transparansi.

REFERENSI

Bannister, F., & Connolly, R. (2020). The great theory hunt: Does e-government really have a problem? *Government Information Quarterly*, 37(2), 101426.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101426>

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022*. BPS RI.
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2021). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>
- Dawes, S. S. (2009). Governance in the digital age: A research and action framework for an uncertain future. *Government Information Quarterly*, 26(2), 257–264. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.12.003>
- Heeks, R. (2018). *Information and Communication Technology for Development (ICT4D)*. Routledge.
- Janenova, S., & Kim, P. S. (2019). Innovating public service delivery in transitional countries: The case of One-Stop Shops in Kazakhstan. *International Journal of Public Administration*, 39(4), 323–332. <https://doi.org/10.1080/01900692.2015.1018432>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). *Laporan Tahunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2022*. Kominfo.
- Meijer, A. (2019). Datapolis: A public governance perspective on 'smart cities'. *Perspectives on Public Management and Governance*, 1(3), 195–206. <https://doi.org/10.1093/ppmgov/gvx017>
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. Routledge.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- UN DESA. (2020). *United Nations E-Government Survey 2020: Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development*. United Nations.
- Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Geyer, C. (2019). Artificial intelligence and the public sector—Applications and challenges. *International Journal of Public Administration*, 42(7), 596–615. <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1498103>